

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2018, PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari sisi pelaksanaan kegiatan terdapat 3 unit pelaksana kegiatan yaitu :

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP).
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP);

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2018 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 2.598.851.228,- dari pagu Rp 2.641.630.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan 98,38% berpredikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu *Pelaksanaan Administrasi Perkantoran* dengan 11 (sebelas) sub kegiatan yakni :
 - a) Honorarium pengelolaan keuangan;
 - b) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - d) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - e) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - f) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - g) Penyediaan alat tulis;
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

- j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan
- k) Pengamaan aset, kantor dan rumah jabatan.

Ditahun 2018 untuk kegiatan yang bersifat rutin semua pendanaannya dimasukan dalam 1(satu) dokumen pelaksanaan anggaran dan dikelola di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV terlaksana sebesar Rp 578.488.406,- dari pagu Rp. 581.650.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,79% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan dalam program ini adalah *Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana*.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.077.734.022,- dari pagu dana Rp. 1.092.755.800,- atau dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,63% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan rata-rata capaian fisik sebesar 100% predikat kinerja **Sangat tinggi (ST)**.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 345.155.050,- dari pagu dana Rp. 348.150.000,- atau rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,13% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :
 - a) Kegiatan *Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran* sampai dengan triwulan IV terlaksana sebesar Rp. 175.408.250,- dari pagu dana Rp. 175.740.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,81% dan capaian kinerja fisik (K) 100%.
 - b) Kegiatan *Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan* terlaksana sebesar Rp. 169.746.800,- dari pagu dana Rp. 172.410.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,46%, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100%.
5. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan terealisasi sebesar Rp. 253.425.126,- dari pagu dana Rp. 258.200.500,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan 98.15% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan predikat kinerja

Sangat Tinggi (ST). Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Pembinaan Pasca Panen* berupa pelatihan pasca panen komoditi karet pada 4 kelompok tani.

a. Permasalahan:

Pengolahan karet di kelompok tani sebagian besar hasilnya belum memenuhi standar bokar bersih, sehingga penjualan lump relatif masih rendah

b. Solusi:

Perlu diberikan fasilitasi berupa bantuan peralatan pasca panen untuk memperbaiki mutu hasil olahan karet pada kelompok tani lainnya.

c. Rencana Tindak Lanjut:

Pembentukan kelembagaan petani berupa UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar), yang merupakan kelembagaan di tingkat petani yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pasca panen karet

6. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan realisasi keuangan sebesar Rp. 222.825.100,- dari pagu dana Rp.277.598.500,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 80,27% predikat kinerja **Tinggi (T)**., untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) 52,38% dengan predikat kinerja **Rendah (R)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Pengolahan Hasil Perkebunan* dengan capaian fisik jumlah produk olahan hasil perkebunan sebanyak 11 (sebelas) Produk yaitu, lada bubuk, lada biji, jahe lada instan, kopi jahe lada, sirup air kelapa, selai daging kelapa, VCO. Gula semut aren, gula cetak aren, es kopyor dan saos lada.

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan realisasi keuangannya pada triwulan IV sebesar Rp. 41.317.650,- dari pagu dana Rp. 41.800.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,85% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) 68% dengan predikat kinerja **Sedang (S)**. Pada program ini, target kegiatan 25 transaksi dan realisasi 17 transaksi.

a. Permasalahan:

Untuk mencapai target kegiatan 25 transaksi diperlukan prasarana dan sarana promosi yaitu dengan mengikuti pameran dan expo di dalam maupun luar daerah, namun permasalahannya adalah pagu anggaran yang sangat terbatas.

b. Solusi:

Penambahan pagu anggaran

c. Rencana Tindak Lanjut:

- Mengikuti pameran dan expo bersama-sama/berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti mitra kerja pembangunan di bidang perkebunan antara lain, perusahaan besar swasta/GAPKI, asosiasi petani, produsen benih, produsen obat-obatan dan petani andalan.
8. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit realisasi keuangan pada triwulan IV sebesar Rp. 922.495.300,- dari pagu dana Rp. 9406.750.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 97,44% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) mencapai 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan*, ditahun 2018 target perluasan sebesar 25 Ha untuk komoditi lada.
 9. Program Konservasi Lahan dan Air dengan pagu dana sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 296.772.900,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,92% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) yakni 142 % dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah *Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan* dengan target identifikasi embung 50 unit, untuk realisasi sampai dengan triwulan IV identifikasi embung sebanyak 71 unit.
 10. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 143.486.900,- dari pagu sebesar Rp. 147.000.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 97,61% predikat kinerja **Sangat Tinggi (S)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (S)**. Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah kegiatan *Pengembangan Database Usaha Perkebunan* dengan target 2 database. 2 database ini berupa peta sebaran IUP Kaltim dan laporan sebaran perijinan. Database ini diperoleh pada akhir tahun, saat ini masih dalam proses pengumpulan data.
 11. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 151.825.500,- dari pagu sebesar Rp. 153.000.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,23% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 50% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah *Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan*. Sampai Triwulan IV jumlah kemitraan usaha perkebunan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 10 kelompok dari target 20 kelompok.

- a. Permasalahan:
Target belum tercapai dikarenakan baru 10 perusahaan yang mengajukan penilaian usaha perkebunan
 - b. Solusi:
Melakukan koordinasi dengan perusahaan
 - c. Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan sosialisasi dan berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan
12. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih realisasi keuangan triwulan IV sebesar Rp. 571.587.693,- dari pagu sebesar Rp. 602.500.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 94,87% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 118,67% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Sertifikasi Benih* dengan target 150 (seratus lima puluh) lembar. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 178 lembar.
 13. Program Pengendalian OPT realisasi keuangan triwulan IV sebesar Rp. 55.892.840,- dari pagu sebesar Rp. 56.400.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,1% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Target 25 kelompok tani sudah tercapai.
 14. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) realisasi keuangan triwulan IV sebesar Rp. 323.977.700,- dari pagu sebesar Rp. 397.840.200,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,74% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)* dengan target 2.500 Kg. Masih dalam pembuatan starter, diperkirakan dalam waktu 3 minggu target sebanyak 2.500 kg akan tercapai.
 15. Program Penyediaan Bahan Tanaman realisasi keuangan triwulan IV sebesar Rp. 1.298.114.766,- dari pagu sebesar Rp. 1.314.725.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,74% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan* dengan target 115.000 benih. Program ini tidak sesuai target dikarenakan ketika pelaksanaan tender mengalami 3 kali gagal, tetapi

sekarang sudah ditetapkan penyediannya dengan masa kerja 3 Mei – 8 November 2018. Target 115.000 benih telah tercapai di triwulan IV.

16. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan realisasi keuangan triwulan III sebesar Rp. 184.531.000,- dari pagu sebesar Rp. 204.300.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 90,32% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Intensifikasi Lada* dengan target 75 ha. Target telah tercapai dan rencana tindak lanjutnya dengan melakukan monitoring.

Tahun 2018 Dinas Perkebunan melaksanakan 16 (enam belas) program pembangunan perkebunan dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 9.364.300.000,-** (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 9.066.881.181,-** (sembilan milyar enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau **95,69%** realisasi fisik dan **95,68%** realisasi keuangan.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan khususnya untuk mencapai sasaran startegis dalam penetapan kinerja, hasil yang diperoleh belum maksimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pencapaian target tersebut, diantaranya adalah :

- a) ketersediaan benih
- b) serangan hama dan penyakit.
- c) stabilitas harga, serta
- d) aspek pemasaran.

Diharapkan pada tahun 2019 nanti masalah-masalah tersebut diatas dapat diminimalisir dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih diarahkan untuk mencapai sasaran yang ingin diperoleh, adapun kegiatan tersebut antara lain perbanyak bahan tanaman perkebunan, yang bertujuan menyiapkan benih komoditi unggulan perkebunan melalui pembangunan kebun-kebun induk dan sumber benih untuk menjamin ketersediaan benih dilapangan, untuk mengatasi serangan hama dan penyakit akan dilakukan identifikasi dan pengendalian OPT serta pengembangan dan perbanyak agens pengendali hayati (APH) yang merupakan pengendalian

dengan metode ramah lingkungan sedangkan disektor pemasaran masih lemah di jalur kelembagaannya, hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya pasar komoditas perkebunan salah satunya dimana pasar ekspor komoditas perkebunan masih terkonsentrasi pada negara pengimpor tradisional sedangkan untuk pasar baru masih terbatas. Di samping itu, pembentukan harga juga dikuasai oleh beberapa pelaku pasar, permasalahan pun terjadi dalam hal keterjangkauan harga dimana struktur pasar produk pertanian dikuasai oleh beberapa pelaku utama saja. Oleh sebab itu, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel II.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	0	5.1	5.4	5.7	4.33	5.1	5.4	5.7
	Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)		0	17.544	18.773	20.087	16.361	17.544	18.773	20.087
2.	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISPO (Perusahaan)	Terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dan tertib hukum	0	43	48	53	38	43	48	53
3.	NTP pekebun (%)	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	0	89	92	95	88.45	89	92	95
4.	Produksi Komoditas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditas		15.288.465	16.812.938	17.136.849	13.450.768	13.450.768	16.812.938	17.136.849

No	Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Ton)	Perkebunan								
	a. Kelapa Sawit		18.000.000	15.197.000	16.717.254	17.036.402	13.371.756	13.371.756	16.717.254	17.036.402
	b. Karet		93.250	70.533	74.060	77.763	57.389	57.389	74.060	77.763
	c. Kelapa		3.850	12.105	12.468	12.479	12.746	12.746	12.468	12.479
	d. Kakao		10.930	3.006	3.307	3.771	2.393	2.393	3.307	3.771
	e. Lada		7.420	5.317	5.849	6.434	6.484	6.484	5.849	6.434
5.	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO ₂ eq)	Menurunnya Emisi dari Sektor Perkebunan	0	4,785	4,08	4,07	1,87	4,7	4,08	4,07
6.	Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan (Perusahaan)	Tersertifikasinya Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan	0	32	35	35	98	32	35	35
7.	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	Meningkatnya Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI	0	2	3	3	0	2	3	3

Uraian Pencapaian Kinerja

1. Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB

Tabel II.2

Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2012-2018)

Sektor/Lapangan Usaha			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		5,47	5,65	7,00	7,72	7,96	7,96	7,88
	1	Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian	3,22	3,36	4,55	5,35	5,35	5,35	5,24
	a	Tanaman Pangan	0,21	0,22	0,19	0,19	0,19	0,19	0,22
	b	Tanaman Hortikultura	0,26	0,26	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34
	c	Tanaman	2,47	2,59	4,49	4,49	4,49	4,49	4,33

Sektor/Lapangan Usaha				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
		Perkebunan								
		d	Peternakan	0,24	0,25	0,26	0,29	0,32	0,30	0,31
		e	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu		1,19	1,11	1,16	1,33	1,34	1,15	1,15
	3	Perikanan		1,07	1,18	1,30	1,50	1,54	1,46	1,48

*Data sangat sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Struktur perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh tanaman perkebunan yang selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 sebesar 2,47 naik menjadi 4,49% pada 2017 dan data sangat sementara tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 4,33%.

2. Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan

Tabel II.3

Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Nilai (miliar rupiah)	11,591	12,835	13,721	14,151	15,324	16,361
Persentase (%)		10.73	6.90	3.13	8.29	6.76
Pertumbuhan		1,244	886	430	1,173	1,037

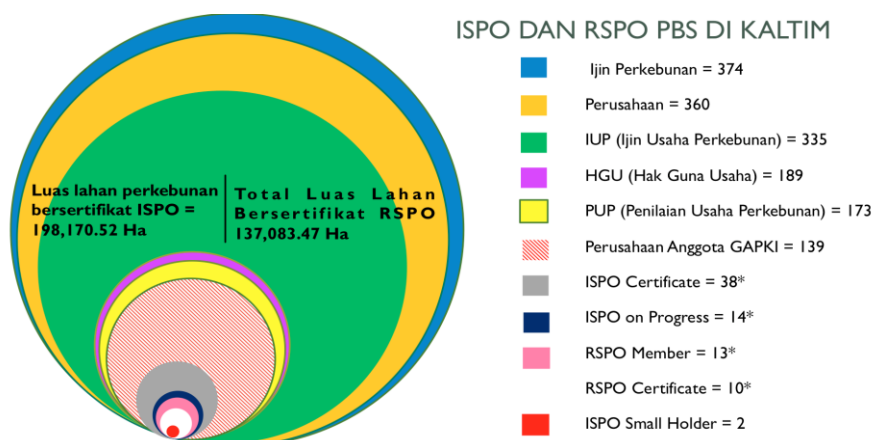
*Data sangat sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Pada 2018 peningkatan mencapai 6,76 %.

3. Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan

Gambar II.1

ISPO dan RSPO PBS di Kalimantan Timur Tahun 2018



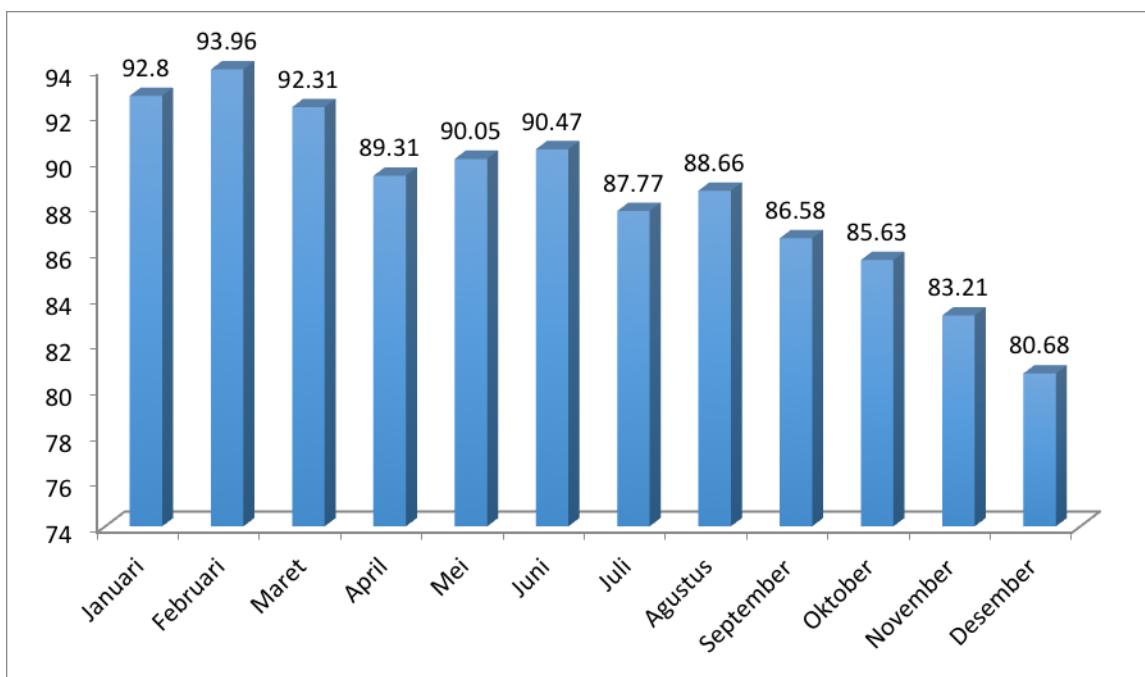
Dari 360 Perusahaan di Kalimantan Timur, sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 Perusahaan telah mendapat sertifikat ISPO dengan luas 198.885,52 HA atau sekitar 16,68% dari total luas perkebunan sawit di Kalimantan Timur.

4. NTP Pekebun

Jika dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), selama tahun 2018 rata-rata NTP sektor perkebunan sebesar 88,45%. NTP subsektor perkebunan rakyat terlihat cenderung menurun pada semester pertama dan pada semester kedua nilainya menjadi sangat fluktuatif terutama pada bulan Juli sampai Oktober. NTP subsektor perkebunan rakyat selama 2018 tidak pernah mencapai angka 100 sehingga dapat dikatakan bahwa selama 2018 petani perkebunan rakyat selalu mengalami defisit. Bulan Februari merupakan bulan dengan NTP tertinggi, yaitu sebesar 93,96, hampir mendekati 100 dan Bulan Desember merupakan angka terendah NTP yakni sebesar 80,21 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II.4

NTP Sektor Perkebunan Januari-Desember 2018



5. Produksi Komoditas Perkebunan

a) Tanaman Kelapa Sawit

Seiring dengan pencanangan program satu juta hektar kelapa sawit di Kalimantan Timur, luas kelapa sawit mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2014 luas tanaman

kelapa sawit sebanyak 1.020.413 hektar dan pada tahun 2018 luas tanaman menjadi 1.199.407 hektar, sehingga terjadi kenaikan sebanyak 178.994 hektar atau 17,54 persen. Peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) meningkat tajam ditahun 2018 menjadi 13.291.773 ton tandan buah segar (TBS) dari 9.628.072 ton (2014), sehingga peningkatannya sebesar 3.663.701 ton TBS atau 38,05 persen.

b) Tanaman Karet

Komoditi karet turut mengalami kenaikan luasan secara signifikan seiring terlaksananya program revitalisasi karet di wilayah Kabupaten dan Kota. Luas tanaman karet mengalami kenaikan sebanyak 1.597 hektar atau 1,41 persen, dimana pada tahun 2014 luas tanaman karet masih 113.485 hektar menjadi 115.082 hektar pada tahun 2018. Produksi karet di tahun 2014 sebesar 63.281 ton karet kering dan pada tahun 2018 turun menjadi 57.389 ton karet kering sehingga mengalami penurunan sebesar 5.892 ton karet kering atau 9,31 persen.

c) Tanaman Kakao

Komoditi kakao mengalami penurunan luas tanam sebanyak 2.216 hektar atau 23,29 persen, dimana pada tahun 2014 luas tanam kakao mencapai 9.514 hektar menjadi 7.298 hektar pada tahun 2018. Penurunan luas tanam akibat tidak seimbangnya antara peremajaan (penanaman baru) dengan jumlah tanaman yang telah tua dan mati. Selain itu adanya alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan. Hal ini seiring dengan terjadinya penurunan terhadap produksi kakao sebesar 1.660 ton biji kakao kering atau 40,96 persen, dimana pada tahun 2014 produksi sebesar 4.053 ton dan pada tahun 2018 menjadi 2.393 ton.

d) Tanaman Kelapa Dalam

Komoditi kelapa dalam di Kalimantan Timur juga mengalami penurunan luas tanam sebanyak 4.834 hektar (18,12 persen) dari 26.674 hektar pada tahun 2014 menjadi 21.840 hektar pada tahun 2018. Penurunan luas tanam akibat tidak seimbangnya antara peremajaan (penanaman baru) dengan jumlah tanaman yang telah tua dan mati. Penurunan luasan kelapa dalam diikuti dengan kenaikan jumlah produksi yang mana pada tahun 2014 produksi kelapa dalam sebesar 11.424 ton dan tahun 2018 menjadi 12.746 ton sehingga jumlah kenaikan sebesar 1.322 ton atau 11,57 persen.

e) Tanaman Lada

Komoditi lada mengalami penurunan luas tanam akibat banyaknya tanaman tua dan mati, alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan. Pada tahun 2014 luas tanam sebanyak 9.497 hektar menjadi 9.021 hektar pada tahun 2018, sehingga mengalami penurunan sebanyak 476 hektar atau 5,01 persen. Produksi lada mengalami penurunan akibat berkurangnya luas tanam produktif dan minimnya pemeliharaan tanaman. Pada tahun 2014 produksi sebesar 6.704 ton lada kering dan tahun 2018 produksi lada menjadi 6.484 ton lada kering sehingga terjadi penurunan produksi sebesar 220 ton lada kering atau 3,28 persen.

6. Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan

Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan pada tahun 2017 mencapai 1,87 juta ton CO₂eq. Diharapkan pada tahun 2018 penurunan dapat mencapai 4,785 Juta ton CO₂eq. Penurunan emisi pada sektor perkebunan diprediksi akan mengalami kenaikan seiring dengan adanya kegiatan perluasan yang dilakukan setiap tahunnya.

7. Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan

Dari 329 IUP di Kaltim, pada tahun 2018 sebanyak 200 IUP telah melakukan pengajuan PUP dan yang telah dilakukan penilaian sebanyak 173 IUP dengan jumlah Tahap Pembangunan A hingga E sebanyak 83 dan jumlah Tahap Operasional I hingga IV sebanyak 90 IUP yang tersebar di 6 kabupaten yaitu Paser, PPU, Kukar, Kubar, Kutim dan Berau.

8. Jumlah Produk Perkebunan yang Bersertifikat SNI

Sampai dengan tahun 2018, belum ada produk perkebunan yang bersertifikasi SNI. Karena program tersebut dilaksanakan pada tahun 2020.

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berupa peluang dan ancaman juga kekuatan dan kelemahan yang ada terkait dengan dinamika lingkungan strategis, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan

Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk perkebunan, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami Konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai $\pm 88,47$ % lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas $\pm 3,08$ Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar $\pm 1,32$ Juta Ha atau 42% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada ± 58 % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2018, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 394 ijin seluas 3.089.234 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 338 IUP dengan luas 2.594.626 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2017 adalah 1.192.342 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya. Data diatas menunjukan bawa terdapat 1,2 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

Tabel II.5
Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
		Luas yang Telah Dibebani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	
1	2	3	4	5	6
1	Berau	314.581	207.314	123.604	92.650
2	Kutai Timur	791.203	749.947	35.568	352.882
3	Kutai Kertanegara	679.578	668.980	266.478	189.657
4	Kutai Barat	549.974	419.488	163.331	121.226
5	Mahakam Ulu	269.723	178.076	35.047	19.862
6	Penajam Paser Utara	136.031	136.726	31.589	30.406
7	Paser	348.144	234.094	134.899	101.116
8	Samarinda	-	-	-	-
9	Balikpapan	-	-	-	-
10	Bontang	-	-	-	20
	Jumlah	3.089.234	2.594.626	1.112.515	907.819

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2019)

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak clear dan cleannya ijin

yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek landbanking yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini menyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagian perijinan di sektor perkebunan belum clear dan clean;
- b. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU belum optimal;
- c. Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan belum ada upaya pencabutan;
- d. Pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun masa pembangunan dan operasional belum dilakukan sebagaimana mestinya;
- e. Masih banyak terjadi konflik usaha perkebunan;
- f. Koordinasi penerbitan ijin usaha perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Provinsi belum terlaksana dengan baik; dan
- g. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi, pengawasan dan pelaporan yang modern berbasis IT dan spasial.

2. Rendahnya produktivitas kebun rakyat

Sebagaimana dijelaskan di dalam RPJMD, keterbatasan lapangan usaha masyarakat berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera.

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utama

tanaman kelapa sawit. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 56,46% (4,49% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Rincian produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2014-2018 pada tabel berikut:

Tabel II.6
Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2013-2017

Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Potensi berdasarkan PDKP
Kelapa Sawit	14,76	15,39	14,47	15,72	16,57	20,00
Karet	1,38	1,38	1,33	1,34	1,22	1,67
Kakao	0,707	0,765	0,552	0,501	0,551	1,00
Kelapa Dalam	0,564	0,684	0,634	0,802	0,751	1,50
Lada	1,034	1,061	0,724	0,985	1,049	1,20
Kopi	0,229	0,215	0,243	0,256	0,244	1,30

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk di tingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Permasalahan “**Rendahnya produktivitas kebun rakyat**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- Keterbatasan permodalan;
- Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;
- Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;
- Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS ;
- Kurang tersedianya benih yang berkualitas;
- Penggunaan benih yang illegitim;
- Praktek budidaya yang tidak tepat; dan

- h. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.

3. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal

Luas areal komoditi non sawit di Provinsi Kalimantan Timur seluas 159.725 Ha pada tahun 2017 dan 158.539 Ha pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, areal komoditi non sawit mengalami penurunan hingga mencapai 0,74%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat petani terhadap komoditi non sawit, terbatasnya lahan pengembangan, ketersediaan benih, dan sulitnya pemasaran.

Permasalahan “**Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Harga komoditas non sawit fluktuatif;
- b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;
- c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya; dan
- d. Rantai pemasaran komoditas non sawit belum berpihak kepada petani.

4. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat

terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil pertaniannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi crude palm oil (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk crumb rubber, walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern berbasis IT;
- b. Kurangnya pelatihan dan praktek mengolah mandiri oleh para pekebun;
- c. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana;
- d. Kurangnya Sosialisasi dan pengenalan produk-produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota;
- e. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;
- f. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang;
- g. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani; dan
- h. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik.

5. Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh perluasan areal perkebunan dianggap salah satu faktor meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menurunnya keanekaragaman hayati (biodiversiti). Namun, informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK, 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Pengikatan karbon (sekuistrasi) bersih sebesar 23 juta ton CO₂ pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode

2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO₂ atau sekitar 12,5 juta ton CO₂ per tahun.

Pemanasan global (*global warming*), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional dan nasioan dan global.

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan **“Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan ”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Adanya kampanye negatif terhadap kelapa sawit;
- b. Belum semua pihak memahami makna perkebunan yang berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang diperuntukkan bagi pembangunan perkebunan;
- d. Masih ada aktivitas pembangunan kebun rakyat di kawasan hutan;
- e. Supply Chain produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;
- f. Pengawasan dan penerapan Sanksi oleh penerbit izin usaha belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam; dan
- h. Pemanfaatan limbah cair untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal.

6. Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah

Informasi dan data yang akurat merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pembangunan Perkebunan membutuhkan sistem pengelolaan data yang akurat untuk digunakan pada proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan. Pengelolaan data ini tidak hanya cukup berisi data tabular variabel kuantitatif dan waktu, namun harus dilengkapi dengan aspek spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan ruang dimana kebun tersebut akan dan telah dibangun.

Padahal, pelaporan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan. Apabila data-data yang disampaikan tidak akurat, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang salah dan tentu saja akan membawa dampak buruk bagi Dinas Perkebunan.

Selain itu, aspek spasial diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi tabular. Selama ini pemanfaatan data spasial di Dinas Perkebunan terbatas pada saat pemberian pertimbangan teknis ijin yang akan diberikan namun pada saat evaluasi, pengawasan dan pembinaan aspek spasial belum banyak di dayagunakan. Untuk mengatasi tersebut diperlukan pengumpulan dan verifikasi dan pengolahan data perkebunan yang baik serta dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data detail seperti lokasi, luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan.

Pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan secara online, yaitu : Web Gis Perkebunan, Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan (SIP-Kebun) dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Online. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan akan menjadi jawaban atas semua permasalahan mengenai data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum terkelola dengan baik.

Akar permasalahan **“Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah”** dipicu oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;
- b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;
- c. Sistem pelaporan belum ada referensi secara spasial;
- d. Kurangnya dukungan SDM dan infrastruktur dalam pengelolaan data di Kabupaten/ Kota; dan
- e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik.

7. Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*), dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan;
- b. Perangkat Daerah (PD) yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain;

- c. Mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/ Kota menyebabkan kurang efektifnya koordinasi pelaksanaan pembangunan perkebunan;
- d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan;
- e. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan perkebunan belum optimal; dan
- f. Belum optimalnya dukungan SDM dan sarana prasarana.

II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (*Strenght-Weakness-Oportunity-Treat*) terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Kekuatan yang dimiliki :

- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat.
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai.
- Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Disbun cukup memadai.
- Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan
- Hasil pembangunan bidang perkebunan selama ini
- Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan bidang perkebunan.

2. Peluang yang dimiliki :

- Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang perkebunan.
- Potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif.
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif.
- Adanya pengaruh globalisasi.
- Ketergantungan hasil perkebunan masyarakat cukup tinggi.

3. Kelemahan yang dimiliki :

- Belum lengkap dan akuratnya *data-based* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kaltim.

- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal.
- Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan.
- Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai.
- Lemahnya penegakan hukum.
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik.
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan masih rendah

4. Ancaman yang dimiliki :

- Implementasi Tata Ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan.
- Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan.
- Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang.
- Moratorium ijin pengembangan perkebunan.
- Isu emisi gas rumah kaca.
- Perubahan cuaca/iklim imbas dari global warming.
- Aksesibilitas kekawasan perkebunan masih terbatas.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan.
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal.
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal.
4. Optimalisasi sistem informasi database dalam mendukung pembangunan perkebunan.
5. Fokus pada pelaksanaan pembangunan perkebunan yang terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah.

6. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kebun.
7. Koodinasi internal maupun eksternal secara intensif.
8. Tingkatkan konsolidasi internal.
9. Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat serta konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang perkebunan sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan.
10. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Disbun cukup memadai dan potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif membuat kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal.

II. 5. Review Terhadap Rancangan RKPD

Terlihat bahwa untuk program – program prioritas seperti Program Peningkatan produksi perkebunan; Program Mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan; dan Program Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan PD telah terakomodasi dalam Rancangan RKPD (Tabel T.C 31).

II. 6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah kedepan sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi perkebunan;
2. Mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan;
3. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan; dan
4. Peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan.

Berdasarkan hasil forum OPD Lingkup Dinas Perkebunan se Kalimantan Timur, berikut beberapa program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD Kabupaten/Kota yang diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi.

Tabel. II. 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Kabupaten	Program/Kegiatan	Sasaran/Kegiatan	Target/Kegiatan	Lokasi	Usulan/Dana	Komitmen	Keterangan	Catatan
3.03.88		Program/penyediaan Bahan Tanaman							
3.03.88.01	Berau	Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan	Pemenuhan bibit lada	20000 pohon	Pesayan, Kec. Sambaliung	20,000,000	-	Pengembangan tanaman lada (membangun kebun induk) lokasi: pesayan	Sesuai dengan program prioritas provinsi
3.03.58		Program/Peningkatan Produktivitas Perkebunan							
3.03.58.01	Kutai Timur	Intensifikasi Komoditi	Kelompok tani	79 Ha	Bumi Jaya Kec. Kaubun Bumi Rapak Kec. Kaubun Cipta Graha Kec. Kaubun	87,000,000	-		- Sesuai prioritas provinsi - Lokasi diusulkan di kec. Karangas desa Karangas dan Batu Lekoq - Komoditi kakao 100 Ha
3.03.58.03	Kutai Barat	Peremajaan Komoditi Perkebunan	Terlaksananya rehab kebun karet rakyat	200 Ha	Asa, Kec. Barong Tongkok; Buaq Asa, Kec. Barong Tongkok; Sekolaq Darat, Kec. Barong Tongkok; Purwodadi, Kec. Linggang Bigung; Sri Mulyo, Kec. Sekolaq Darat	2,000,000,000	100,000,000		Sesuai Prioritas provinsi 100 Ha
3.03.76		Program/Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca							
3.03.76.04	Kutai Timur	Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan	Kelompok tani Kakao	4 Kelompok	Bukit Harapan Kec. Kaliorang; Belangkau, kec. Kaliorang; Karanganilir, Kec. karangan; Danau redan, Kec. teluk pandan	50,000,000	-		Kelompok tani kakao diganti menjadi kelompok tani sawit